



Pengerjaan Pipanisasi Rp35 M Diperpanjang

Fikri Akbar
Borneo Tribune, *Sanggau*

Tanggal 15 Desember 2012 kemarin, seharusnya merupakan batas akhir dari pengerjaan proyek pipanisasi. Namun kondisi di lapangan melaporkan, proyek yang dianggarkan selama tiga tahun berturut-turut (multi years) itu belum maksimal atau belum selesai.

"Ya kalau kita, menurut ketentuan itu 'kan (mang) hari ini terakhir, (tapi) ada pengaturan dari Dirjen Anggaran, ada solusinya, (diperpanjang) sampai 31 Desember," kata Bupati Sanggau, H Setiman H Sudin kepada Borneo Tribune usai menghadiri pengukuhan wisuda angkatan pertama Sekolah Demokrasi Sanggau di Hotel Grand Narita, Sanggau, Kamis (15/12) kemarin.

Proyek Pipanisasi dianggarkan sejak tahun 2009 hingga 2011 oleh Pemerintah Kabupaten Sanggau. Bahkan dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sanggau sendiri, sejak September lalu sudah membentuk tim peneliti kontrak untuk

permasalahan ini. Namun begitu, Bupati mengakui, hingga kemarin dirinya, belum mendapat konfirmasi dari dinas terkait maupun kontraktor, terkait berapa persen fakta pekerjaan fisik yang sudah terselesaikan di lapangan.

"Saya belum begitu jelas, kemarin sudah saya sampaikan, hari ini tadi datang, supaya mereka bisa membuktikan, menjelaskan apa adanya, sebab duit kan tidak hangus, sebab tahun depan dilanjutkan lagi," beber Setiman.

Artinya menurut Setiman, proyek selama tiga tahun tidak terselesaikan itu, akan dilanjutkan lagi tahun depan. Dan kemungkinan masih dengan kontraktor yang sama.

"Ya meluncurlah lagi pada anggaran tahun depan. Diluncurkan bukan dianggarkan, anggaran ini 'kan meluncur tahun depan. Kalau dia (kontraktor) masih mampu dengan perpanjangan, ya kita lihat, apakah bisa diakui tidak alasannya dengan perpanjangan itu, kalau tidak 'kan dia harus denda. Sebab kalau tidak, BPK akan periksa. Ya kalau dia tidak sanggau dari

“
Saya belum begitu jelas, kemarin sudah saya sampaikan, hari ini tadi datang, supaya mereka bisa membuktikan, menjelaskan apa adanya, sebab duit kan tidak hangus, sebab tahun depan dilanjutkan lagi
”

evaluasi itu, ya diganti," kata dia.

"Dan saya terus terang dengan segala hormat dan sangat, saya minta kepada SKPD jangan nekatlah, sekarang dari BPKP, BPK dari Kejaksaan sudah ketat," pesannya sambil berlalu melewati wartawan.

Hingga berita ini diturunkan, wartawan belum berhasil mengkonfirmasi pihak-pihak terkait.

Namun sebelumnya, pada September lalu,

kepada wartawan, Kepala Dinas PU Kabupaten, Kukuh Triyatmaka sempat menyebutkan, dari sejak dimulainya proyek tersebut pada tahun 2009 hingga menjelang akhir 2011 ini, pengerjaan fisik baru terselesaikan sekitar 30 persen.

"Pipanisasi laporan terakhir, plus minus 30 persenan lebih," kata Kukuh, Jumat (30/9) kemarin.

Kukuh juga menyatakan, DPU akan memilih menempuh jalur mekanisme kontrak oleh tim peneliti kontrak. Sedangkan untuk surat teguran kepada kontraktor sendiri menurutnya, sudah dilayangkan sebanyak dua kali. "Tentunya mekanisme kontraklah yang mesti kita tempuh, kita evaluasi, apakah itu nanti harus dihentikan, diputus kontrak, diperpanjang itu tentu nanti ada tim peneliti kontrak, kita sudah ada, tim dari kita. Kalau teguran saya, dari Kadis ya, terakhir sudah yang kedua," jelasnya.

Menurutnya, seberapa pun hasil proyek yang telah dikerjakan itu nantinya akan menjadi pertimbangan dari tim peneliti

kontrak. Kesalahan keterlambatan pengerjaan itu pun akan ditinjau alasannya.

"Semuanya harus dikaji, alasan, sebab kenapa bias terlambat dan seterusnya, serta data mendukung akan dikaji oleh tim peneliti kontrak. Suatu hal yang diluar kemampuan di rekanan (kontraktor, red) itu akan menjadi pertimbangan, apabila itu menjadi suatu kelalaian berarti tidak dipertimbangkan," tegasnya.

Dijelaskan Kukuh lagi, dari Rp. 35 miliar dianggarkan, baru sekitar Rp7 miliar yang sudah dikeluarkan, termasuk uang muka. Sementara kendala atau alasan yang mungkin masuk akal menjadi pertimbangan oleh tim nantinya, hanya "bersifat pada teknis pengerjaan saja.

"Kendala mungkin saya melihat, masalah tanah atau lokasi ya, izin relokasi bangunan lama, itu perlu waktu, dan soal keinginan masyarakat, pipa boleh lewat sini, pipa tidak boleh lewat sini, sifatnya teknis lapangan. Pengadaan pipa juga ada keterlambatan, terlambat jauh," jelasnya. □